



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. AIPDA MU'AN KOMPLEKS PERKANTORAN

Telp/Fax : (0732) 3341124 Email : diskominfoersantik@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu unsur unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Kepahiang. Untuk mempertanggungjawabkan sampai sejauh mana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang menjalankan amanah tersebut maka diperlukan laporan pertanggungjawaban tahunan disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Pada laporan ini, diungkapkan seluruh aktivitas program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang selama tahun 2021. Program dan kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2021 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah yang telah dituangkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang tahun 2016-2021. Dalam laporan ini disampaikan beberapa indikator kinerja yang dilengkapi dengan bobot masing-masing, sebagai media untuk mengukur kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang selama tahun 2021 sehingga terlihat hal-hal mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kepahiang, Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Kepahiang



Nurimani, SE.
Nurimani, SE.

NIP. 19690128 199803 2 001

DAFTAR ISI

halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Sistematika Penulisan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Tujuan Strategik.....	10
2.3 Sasaran Strategik	11
2.4 Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1 Pengukuran Kinerja	14
3.1 Analisis Pencapaian Kinerja	15
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	16
Bab IV Penutup	20

LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Rencana Strategik (RS)
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
4. Laporan Hasil Evaluasi SPBE
5. Daftar OPD/Ruang Publik Terkoneksi Jaringan Internet Satu Pintu dan Topologi Jaringan
6. Daftar Media Cetak dan Online

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita cita bangsa. Untuk itu perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, terintegritas dan profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi, Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai perwujudan pertanggung jawaban dan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi, tujuan dan sasaran dari instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai dasar penyusunan LAKIP-OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah menetapkan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Good governance merupakan persyaratan bagi setiap instansi Pemerintah guna mempertanggung jawabkan kinerja yang akuntabel, oleh karena itu perlu penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang standar dengan tepat, jelas dan terukur yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu sebagai dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akun Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dimaksudkan untuk. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 adalah. LAKIP merupakan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan penyampaian capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya
2. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan institusi atas capaian kinerja yang di peroleh selama tahun 2021.
3. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagaisarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang untuk upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. sarana pengendalian dan penilaian kinerja sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1.4 Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok yakni membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiandan Statistik Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, humas dan pelayanan administrasi kepada unsur lingkungan dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
3. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pelayanan, pemantauan, penyusunan, menetapkan arah kebijakan program kerja, pengembangan dan pengawasan dibidang komunikasi publik
4. Kepala Bidang E-Government mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, penyusunan, menetapkan arah kebijakan program kerja, pengembangan dan pengawasan di bidang E-Government.
5. Kepala Bidang Hubungan Masyarakatdan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, penyusunan, menetapkan arah kebijakan program kerja, pengembangan dan pengawasan di bidang Hubungan Masyarakatdan Media Massa.
6. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, penyusunan, menetapkan arah kebijakan program kerja, pengembangan dan pengawasan di bidang Persandian dan Statistik.

Sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut diatas, maka Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan rincian sebagai berikut :

I. Kepala

II. Sekretaris

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

III. Bidang Informasi dan komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Kasi Informasi Publik
- b. Kasi Komunikasi Publik
- c. Kasi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

IV. Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa

Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa terdiri dari :

- a. Kasi Layanan Hubungan Kehumasan
- b. Kasi Hubungan Media Massa
- c. Kasi Layanan Hubungan Publikasi Dan Dokumentasi

V. Bidang E-Government

Bidang E-Government terdiri dari :

- a. Kasi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi
- b. Kasi Pengembangan Aplikasi
- c. Kasi Tata Kelola E-Government

V. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari :

- a. Kasi Sandi dan Keamanan Jaringan
- b. Kasi Kajian dan Analisa Data
- c. Kasi Pengelolaan Data Informasi

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 29 orang, Terdiri atas PNS sebanyak 26 Orang, dan Honorer 3 orang.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan		
			II	III	IV
1	Struktural :				
	- Eselon II	1	-	-	1
	- Eselon III	5	-	1	4
	- Eselon IV	11	-	11	-
2.	JFT	-	-	-	-
3.	Staf	9	1	8	-

Tabel 1.2

Jumlah PNS, CPNS Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	Status Kepegawaian		JUMLAH	%
		CPNS	PNS		
1.	SMP	-	-	-	-
2.	SMA	-	1	1	4
3.	D3	-	3	3	11,5
4.	S1	-	20	20	76,9
5.	S2	-	2	2	7,6
		-	26	26	100

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang belum menunjang didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, karena masih kurangnya jumlah personil staf pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Berikut jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

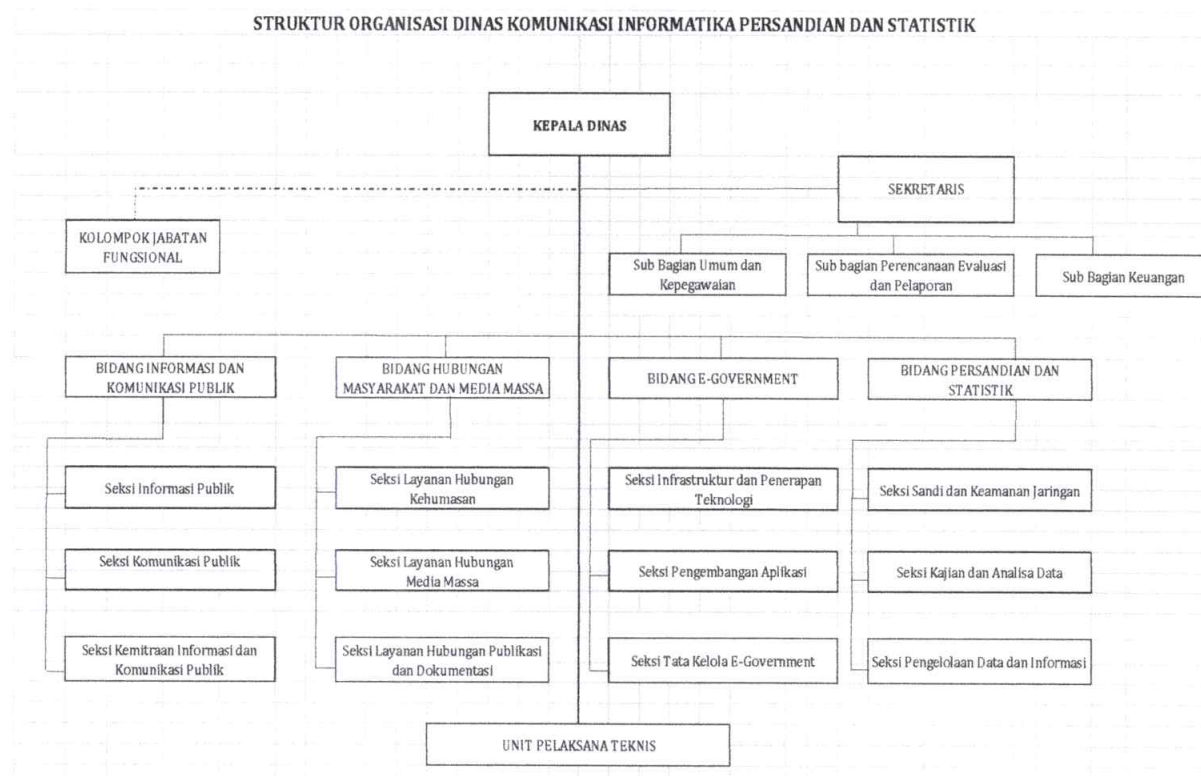
Tabel 1.3

Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	Status Kepegawaian		JUMLAH	%
		CPNS	PNS		
1.	GOLONGAN I	-	-	-	-
2.	GOLONGAN II	-	1	1	4
3.	GOLONGAN III	-	20	20	77
4.	GOLONGAN IV	-	5	5	19
		-	26	26	100

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang berdasarkan golongan terdiri atas Golongan II sebanyak 4%, Golongan golongan III sebanyak 77%, golongan IV sebanyak 19%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik banyak ditempati oleh golongan III, dilainsisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dibawah ini :



1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Tujuan Strategik
- 2.4. Sasaran Strategik
- 2.5. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Kinerja
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

Bab 4 PENUTUP

Lampiran

- *Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2019*
- *Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.*
- *Rencana Strategik Tahun 2016 s/d 2021*
- *Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.*
- *Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.*

PERENCANAAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang

2.1 . Rencana Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten, Merupakan salah satu OPD yang ngemban tugas untuk mendukung visi Kabupaten Kepahiang yaitu :

”Terwujudnya Kabupaten Kepahiang Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang mengemban misi kedua dalam misi pemerintahan daerah kabupaten kepahiang yaitu meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang professional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Dengan tujuan meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan.

Dalam penyusunan laporan kinerja tidak terlepas dari rencana strategis instansi pemerintah, karena rencana strategis merupakan langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana Strategis memuat Tujuan ,sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakn secara sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke

depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan nasional. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang yang merupakan penjabaran dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah selama tahun 2016-2021.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dengan tujuan mewujudkan system tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun *sasaran* yang hendak dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah :

- 1). Meningkatnya keterbukaan, pelayanan dan keamanan informasi publik serta akses masyarakat terhadap media pemerintah
- 2). Indek pemerintahan berbasis elektronik dengan Optimalisasi penerapan e-government;
Meningkatnya OPD yang berbasis E-government (SPBE)

2.2. Tujuan Strategik

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan Strategik yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang:

- a) Meningkatkan Penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik
- b) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya bidang TIK dalam rangka peningkatan profesionalisme dan keterbukaan informasi.
- c) Mewujudkan rumusan kebijakan-kebijakan pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana serta pengawasan di bidang Komunikasi, informasi.

2.4 Sasaran Strategik

Sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, dalam rancana kinerja Tahunan kemudian diimplementasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang untuk mewujudkan visi dan misinya adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya tata kelola komunikasi, informasi persandian dan statistik sesuai standard dan prosedur
2. Tersedianya sarana prasarana komunikasi informasi, pengembangan jaringan konektivitas dan akses internet
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, handal, professional dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi.
4. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas diseluruh Kabupaten Kepahiang.
5. Peningkatan ketersediaan informasi dan komunikasi public

2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan penetapan kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja dalam pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Kepahiang 2021

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Peningkatan ketersediaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah media cetak dan online yang memuat informasi pemerintah daerah	30 Media	Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten kota Sub kegiatan : Layanan Hubungan Media	244.990.000,-
Peningkatan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah OPD dan ruang public yang menggunakan internet satu pintu	18 OPD	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sub kegiatan Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah	1.033.050.000,-
Terselenggaranya kegiatan rutin administrasi perkantoran sesuai dengan standar pelayanan.	Terlaksananya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan bahan logistic kantor 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	69.994.000,- 2.217.043.310 4.847.000,- 2.979.740 82.522.950,- 17.963.000,- 16.920.000,- 143.878.000,-

			Daerah	
			Sub. Kegiatan :	
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.150.000,-
			2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	36.000.000,-
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prenunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub. Kegiatan :	
			1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	91.600.000,-
			2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.660.000,-

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dengan pengukuran kinerja ini maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, mengacu pada Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik dan system pemerintahan berbasis elektronik.

Indek SPBE Pada tahun 2021 dengan mengaju pada lembar kerja SPBE dengan berbagai aspek dan indikator yang telah dicapai berdasarkan penilaian dari deputi kelembagaan dan tata laksana kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi indek SPBE berada pada angka 1,94 (data terlampir), untuk pencapaian indek SPBE sesuai dengan SPBE target indikator sasaran, sedang kan untuk indek keterbukaan publik sampai dengan tahun 2021 belum ada penilaian indek keterbukaan informasi publik, masih dalam tahapan dan proses persiapan aspek dan indikator penilaian. Peningkatan layanan keterbukaan informasi publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik, informasi pemerintahan dan layanan publik.

Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan keberhasilan program kegiatan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, mengacu pada Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang professional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.

Dari Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 dimana visi, misi serta tujuan yang diarahkan untuk pengembangan teknologi informasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menuju *good government dan clean government*. Untuk tahun 2020 terdapat 3 sasaran strategis yang hendak dicapai, namun untuk pelaporan kinerja hanya 2 (dua) sasaran strategis yang akan dilaporkan. Hal ini disebabkan 1 (satu) sasaran merupakan fungsi penunjang dalam organisasi terkait dengan kegiatan rutin administrasi perkantoran.

Berdasarkan penilaian dari deputi kelembagaan dan tata laksana kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nilai indeks SPBE Kabupaten Kepahiang mendapat predikat cukup dengan nilai 1,94.

Penyampaian informasi pemerintah daerah yang bisa diakses oleh masyarakat lewat media cetak dan media online baik dalam bentuk berita, banner, baliho, spanduk, web site dan page dll bekerja sama dengan media yang ada dari 30 media yang ditargetkan terealisasi seratus persen. Dalam rangka untuk mendukung peningkatan indeks SPBE dan keterbukaan publik berbagai aspek dan indikator tahap demi tahap dengan dukungan anggaran yang ada terus ditingkatkan dari aspek kebijakan, tata kelola dan layanan salah satunya dengan pengembangan jaringan internet satu pintu yang terkoneksi sampai dengan tahun 2021 sudah 22 OPD/Ruang publik yang

terhubung dengan jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, ketersediaan anggaran tahun 2021 hanya bisa mengakomodir untuk penambahan pemasangan jaringan internet di 9 titik serta mengakomodir pemeliharaan dan pembayaran internet yang telah terpasang sebelumnya sebanyak 13 titik, peta jaringan dan daftar terlampir.

Pencapaian masing masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
Peningkatan ketersediaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah media cetak dan online yang memuat informasi pemerintah daerah	30	35	116,6
Peningkatan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah OPD dan ruang public yang menggunakan internet satu pintu	18	15	83,3
Terselenggaranya Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya administrasi perkantoran	100	100	100

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kepahiang yang di danai APBD dan Realisasinya TA 2020 di disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	KET.
Program Informasi dan Komunikasi publik	244.990.000,-	239.727.500,-	98	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	244.990.000,-	239.727.500,-	98	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	
Layanan Hubungan Media	244.990.000,-	239.727.500	98	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.033.050.000,-	969.184.500	94	
Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten	1.033.050.000,-	969.184.500	94	
Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	1.033.050.000,-	969.184.500	94	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah kabupaten Kepahiang	-	-		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	-	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.690.558.000,-	2.579.519.653,-	96	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.994.000,-	69.994.000,-	100	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	69.994.000,-	69.994.000,-	100	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.217.043.310,-	2.179.813.741,-	98	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.217.043.310,-	2.179.813.741,-	98	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.110.690,-	198.721.748,-	74	
Penyediaan Komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	4.847.000,-	4.847.000,-	100	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.979.740,-	2.979.740,-	100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.522.950,-	66.163.180,-	80	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.963.000,-	17.812.500,-,-	99	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.920.000,-	16.920.000,-	100	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	143.878.000,-	89.999.328,-	63	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.150.000,-	37.990.164,-	99,58	
Penyediaan jasa surat menyurat	2.150.000,-	2.000.000,-	93	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000,-	35.990.164,-	100	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.260.000,-	93.000.000,-	96,6	
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	91.600.000,-	88.340.000,-	96	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.660.000,-	4.660.000,-	100	
JUMLAH	3.968.598.000,-	3.788.431.653,-	95,5	

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan (PKK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang mencapai 95,5%, hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dinilai **Sangat Baik**. Akuntabilitas Keuangan untuk masing masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Rp. 2.690.558.000,- Realisasi Fisik 100 % Realisasi Keuangan 96 %.

Program ini mencakup 3 kegiatan 12 sub kegiatan, yang bertitik tolak pada pengukuran kinerja kegiatan yang sesuai dengan tingkat capaian masing-masing indikatornya, yaitu indikator input yang tercermin dari tingkatan capaian individu anggaran, sumber daya manusia dan peralatan/bahan dengan dana realisasi sebesar Rp. 2.579.519.653-, pencapaian realisasi fisik dan keuangan rata-rata yaitu 96 %

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Dana Rp. 244.990.000,- atau terealisasi fisik 100 % Realisasi Keuangan 98 %.

Program ini mencakup 1 kegiatan 1 sub kegiatan, yang bertitik tolak pada pengukuran kinerja kegiatan yang sesuai dengan tingkat capaian masing-masing indikatornya, yaitu indikator input yang tercermin dari tingkatan capaian individu anggaran, sumber daya manusia dan peralatan/bahan dengan dana realisasi sebesar Rp. 239.727.500,-, pencapaian realisasi fisik dan keuangan rata-rata yaitu 98%

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp. 1.033.050.000,- realisasi keuangan 94%.

Meliputi satu kegiatan 1 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah dana realisasi Rp. 969.184.500,- pencapaian realisasi keuangan 94%. Dengan anggaran yang tersedia selain pemasangan baru titik spot internet satu pintu yang ditargetkan 8 titik terealisasi 8 titik juga mengakomodir pembayaran internet yang telah terpasang sebelumnya sejumlah 14 titik.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja pelaksanaan di Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang akan ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan yang mendukung Visi dan misi Kabupaten Kepahiang.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa pada tahun anggaran 2021 ini merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang tahun 2016-2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang tahun 2021 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performing Government*) Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2021.

Sebagai akhir kata, kami selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang beserta jajaran mengharapkan agar LAKIP Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi

Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategik (*Strategic Plan*) pada masa yang akan datang.

Kepahiang, Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, . P
Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang



Nurimani, SE.
NIP. 19690128 199803 2 001

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN					PROGRAM	INDOKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						2017	2018	2019	2020	2021				
											Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase tingkat pengelolaan aplikasi	Kegiatan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik	Jumlah OPD dan lembaga pelayanan publik yang mendapat layanan nama domain dan sub domain
											Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Waka	Fasilitasi Kegiatan HUT Kabupaten	Jumlah kegiatan HUT Kabupaten
											Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Fasilitasi Kegiatan HUT Hari Besar Lainnya	Jumlah kegiatan HUT hari besar lainnya
												Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	
												Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kantor yang menggunakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
												penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	
												penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat-alat kebersihan	
												Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	
												penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetak dan penggandaan	
												Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	
												penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	
												Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	
												penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	
												Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN				PROGRAM	INDOKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						2017	2018	2019	2020				
										Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Penyediaan jasa tenaga kontrak	Jumlah tenaga kontrak/THL
										Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor
										Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tingkat capaian kinerja dan keuangan	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor
											Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung
											Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
											Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
											Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yg terpelihara
											Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian seragam khusus hari-hari tertentu
											Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen dan laporan

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDOKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Pengelolaan Informasi dan komunikasi public pemerintah daerah Tk. Kabupaten	Persentase tingkat pengelolaan informasi publik	75	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat pengelolaan informasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	persentase tingkat pengelolaan informasi publik daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	Jumlah media cetak dan online yang memuat informasi pemerintah daerah	30 media	244.990.000
2	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah kabupaten	Persentase pengelolaan e-government di lingkup pemerintah kabupaten	70	Program Aplikasi Informatika	1. Persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK di lingkup pemerintah Kabupaten Kepahang 2. Persentase kualitas jaringan infrastruktur pendukung layanan yang berbasis TIK di Lingkup Kabupaten Kepahang	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kenaharian	Persentase penggunaan nama domain dan sub domain yang telah ditetapkan di lingkungan pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah OPD yang menggunakan/menerapkan PPD (Sosialisasi dan Regulasi)	21 OPD	-
	Ketersediaan data statistik sektoral yang dapat diakses secara mudah dan cepat	Persentase data yang terdokumentasi dan dapat diakses	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data yang terdokumentasi dan dapat diakses	Penyenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Daerah Kabupaten	Persentase data statistik sektoral sebagai informasi pemerintah daerah	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	Jumlah perangkat daerah yang telah mengumpulkan dan menganalisis data statistik sektoral dan persentase desiminasi data statistik sektoral (sosialisasi dan pencetakan buku statistik)	25 OPD, 1 BUKU	-
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan pejabat pengadaan barang jasa pejabat penerima hasil pekerjaan dan penanggungjawab aplikasi	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, tersedianya jasa tenaga thi, honorarium PA, pejabat pengadaan barang jasa pejabat penerima hasil pekerjaan dan penanggungjawab aplikasi	1 Tahun	69.994.000
						Administrasi umum perangkat daerah	persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.217.043.310
						Administrasi umum perangkat daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	9 jenis	4.847.000
								penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	12 Jenis	2.979.740
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Mekan Minum Kantor, Peralatan Kebersihan	1 Tahun	82.522.950

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDOKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								penyediaan barang cetakan dan pergandaan	Jumlah cetak dan pengandaan	3 item, 31.123 lembar	17.963.000
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	16.920.000
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah belanja perjalanan dinas tetap, biasa dan dalam kota	1 Tahun	143.878.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat dan materi	200 lembar	2.150.000
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tahun	36.000.000
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lababaci.	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	4 Unit roda 4, 3 unit roda 2	91.600.000
								Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	7 Unit	4.660.000

KEPAHIANG, AGUSTUS 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KAB. KEPAHIANG



KUSHADI CAHYADI, S.IP.

PEMBINA Tk.I, IV /b, NIP. 19820612 200604 1 009

**CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH KABUPATEN KEPAHANG**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	KET.
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah	1.033.050.000	969.184.500	94	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Layanan Hubungan Media	244.990.000	239.727.500	98	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor penyediaan barang cetakan dan pengandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.994.000 2.217.043.310 4.847.000 2.979.740 82.522.950 17.963.000 16.920.000 143.878.000 2.150.000 36.000.000 91.600.000 4.660.000	69.994.000 2.179.813.741 4.847.000 2.979.740 66.163.180 17.812.500 16.920.000 89.999.328 2.000.000 35.990.164 88.340.000 4.660.000	100 98 100 100 80 99 100 63 93 100 96 100	
JUMLAH				3.968.598.000	3.788.431.653	95,5	

KEPAHIANG, JANUARI 2022
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI PERSANDIAN DAN
STATISTIK KAB. KEPAHANG



NIP. 19690128 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Aipda MU'AN Kompleks Perkantoran PEMDA, Kelopak, Kabupaten Kepahiang
KEPAHIANG

PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH MENGGUNAKAN INTERNET SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG

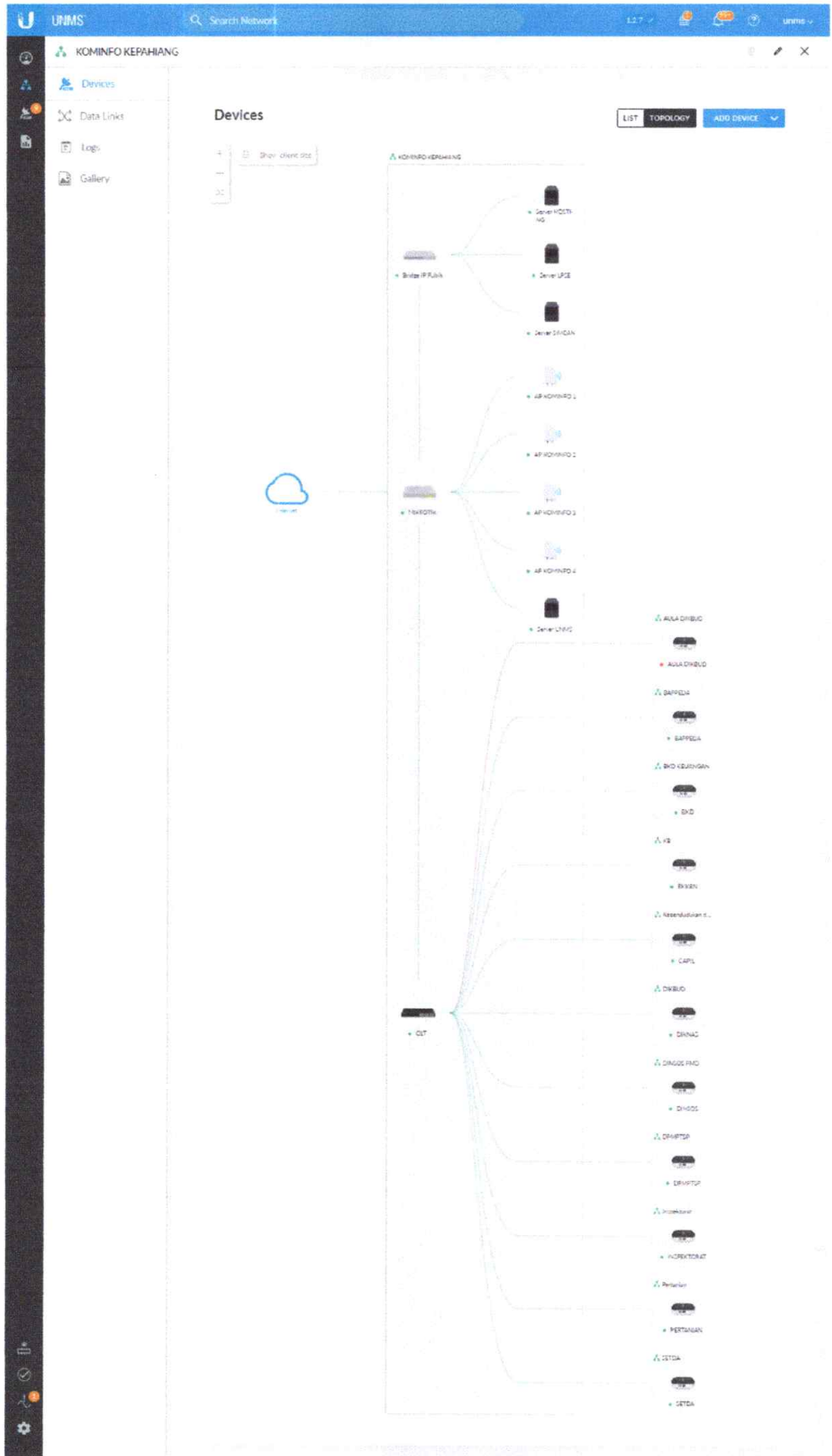
NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	
	BAGIAN PBJ SETDA KABUPATEN KEPAHIANG	
	BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPAHIANG	
	BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG	
	RUANG BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG	
	RUANG WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG	
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PP DAN PA	
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4	INSPEKTORAT	
6	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM	
7	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
8	DINAS PERTANIAN	
	BPP KEC. KEPAHIANG	
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
10	DINAS SOSIAL	
11	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
13	BADAN KEUANGAN DAERAH	
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Pit. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK KABUPATEN KEPAHIANG

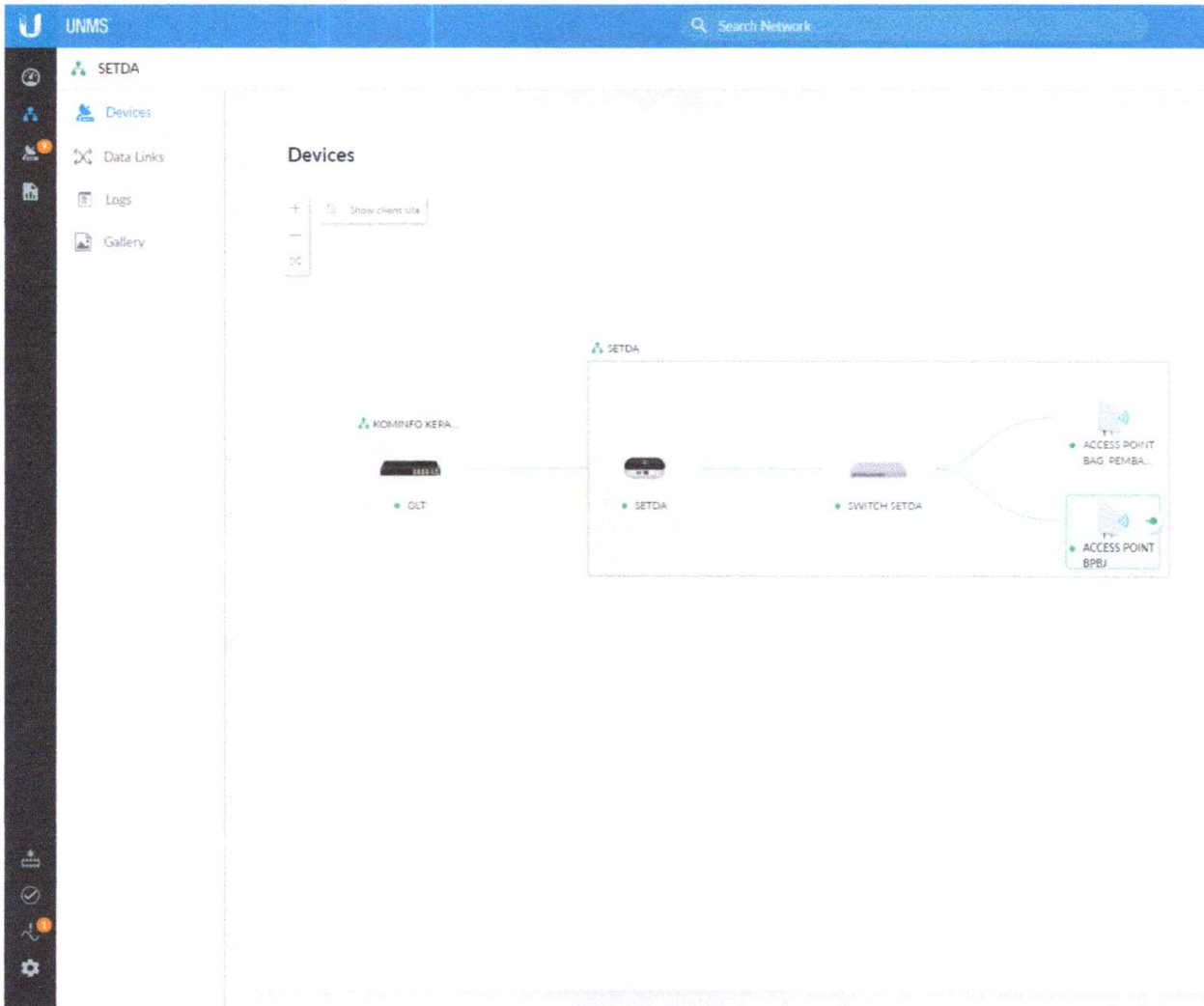


Nurimani, SE
NURIMANI, SE
NIP. 19690128 199803 2 001

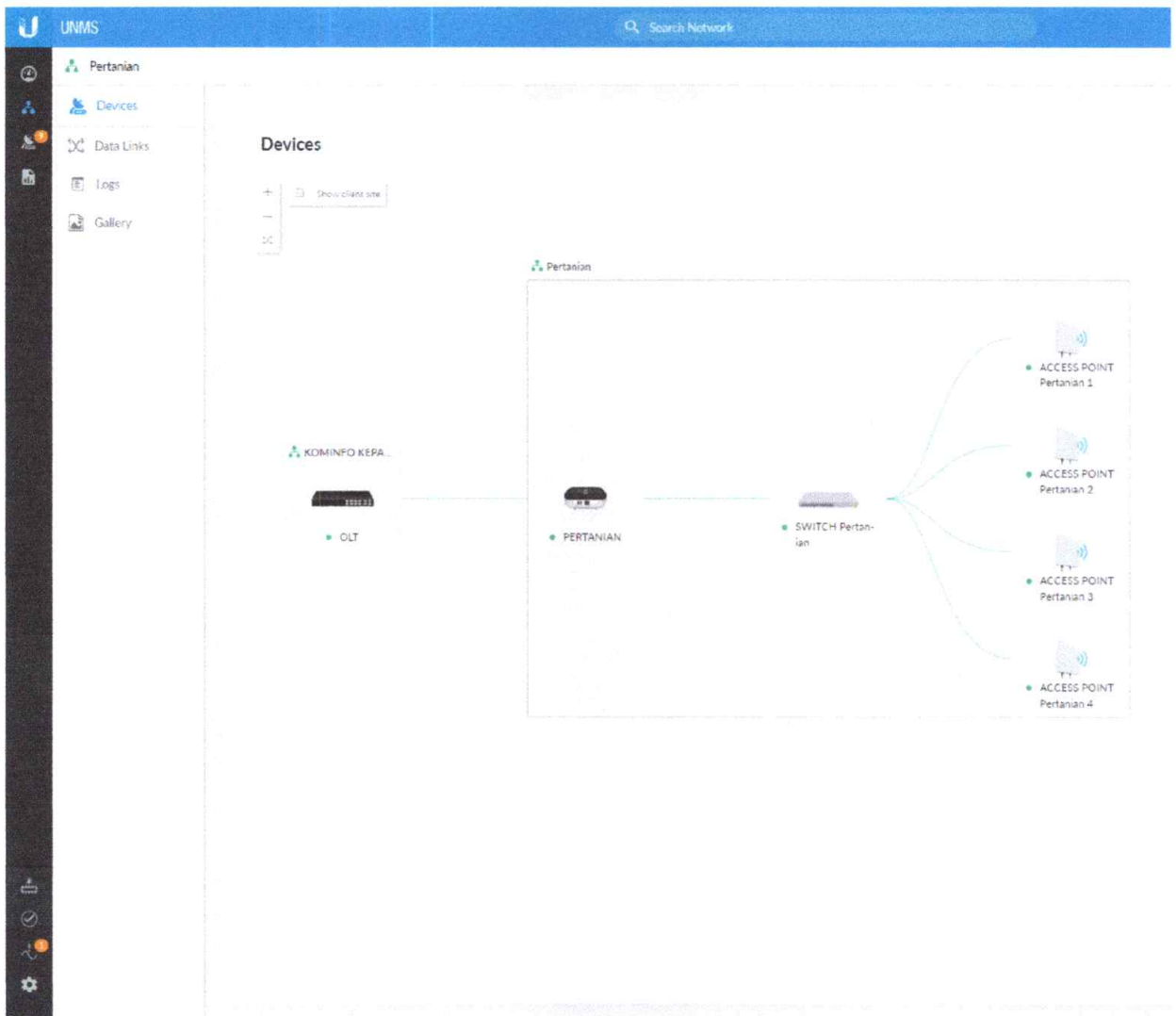
- Topologi Jaringan Dinas Kominfo



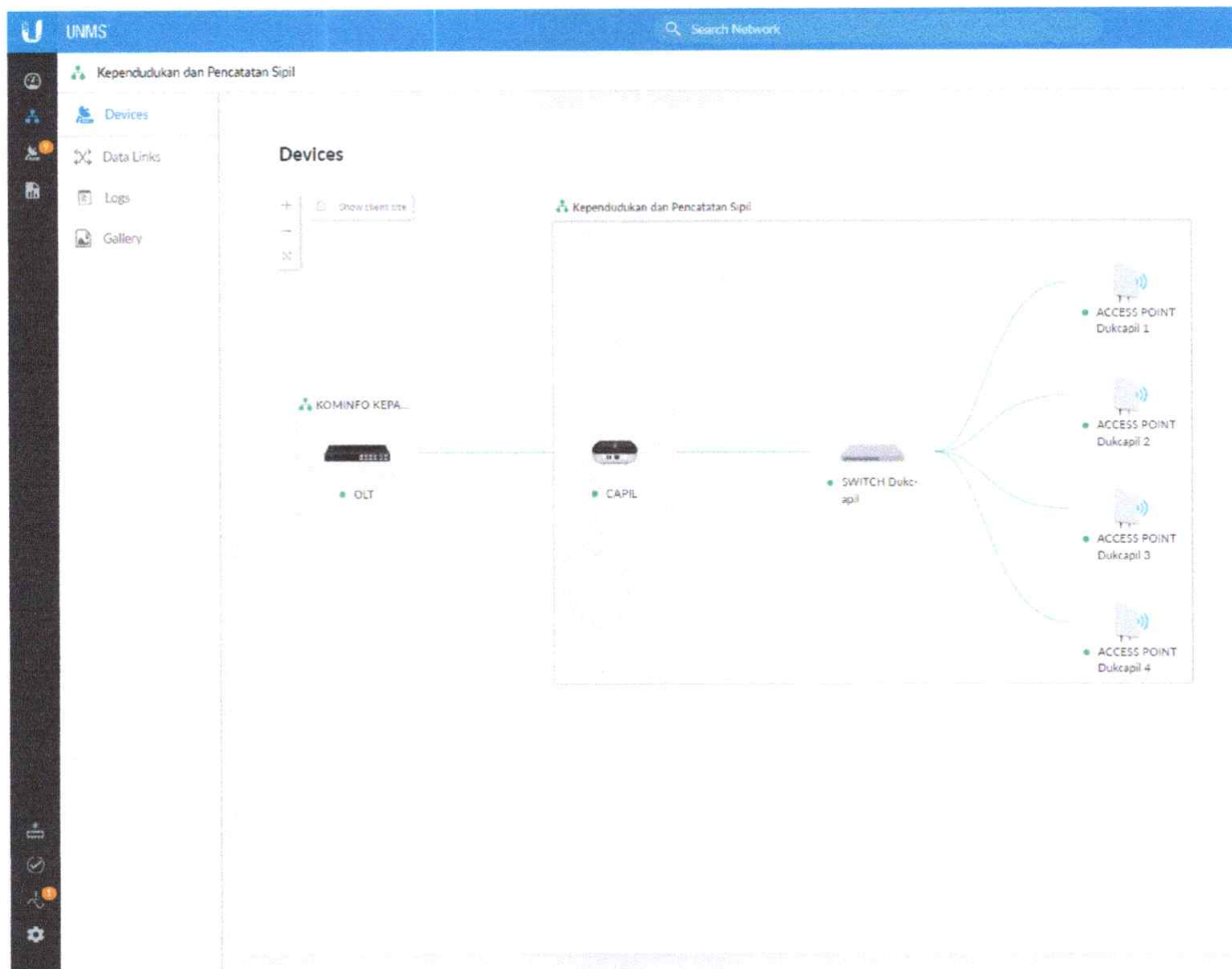
- Topologi Jaringan Sekretariat Daerah



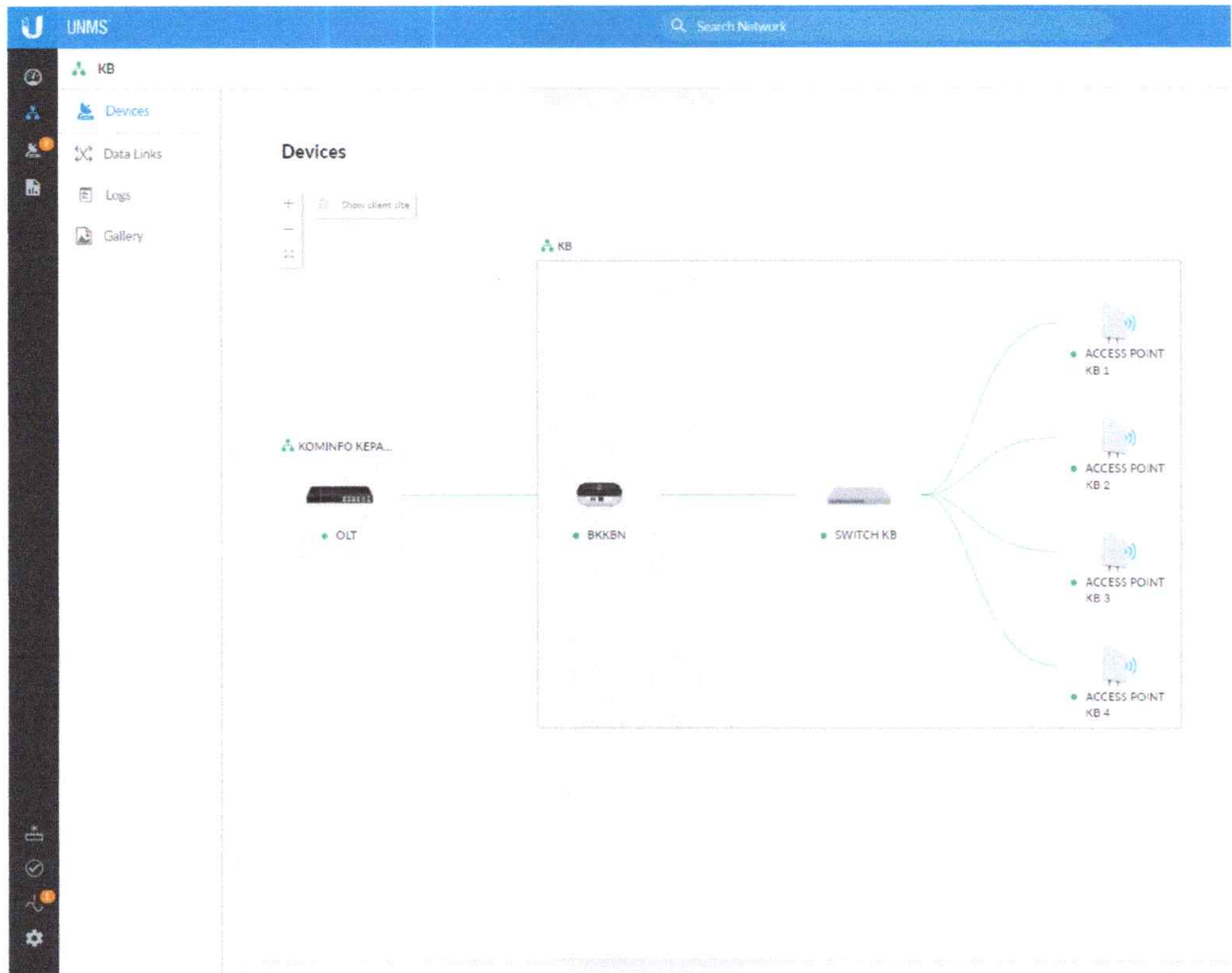
- Topologi Jaringan Dinas Pertanian



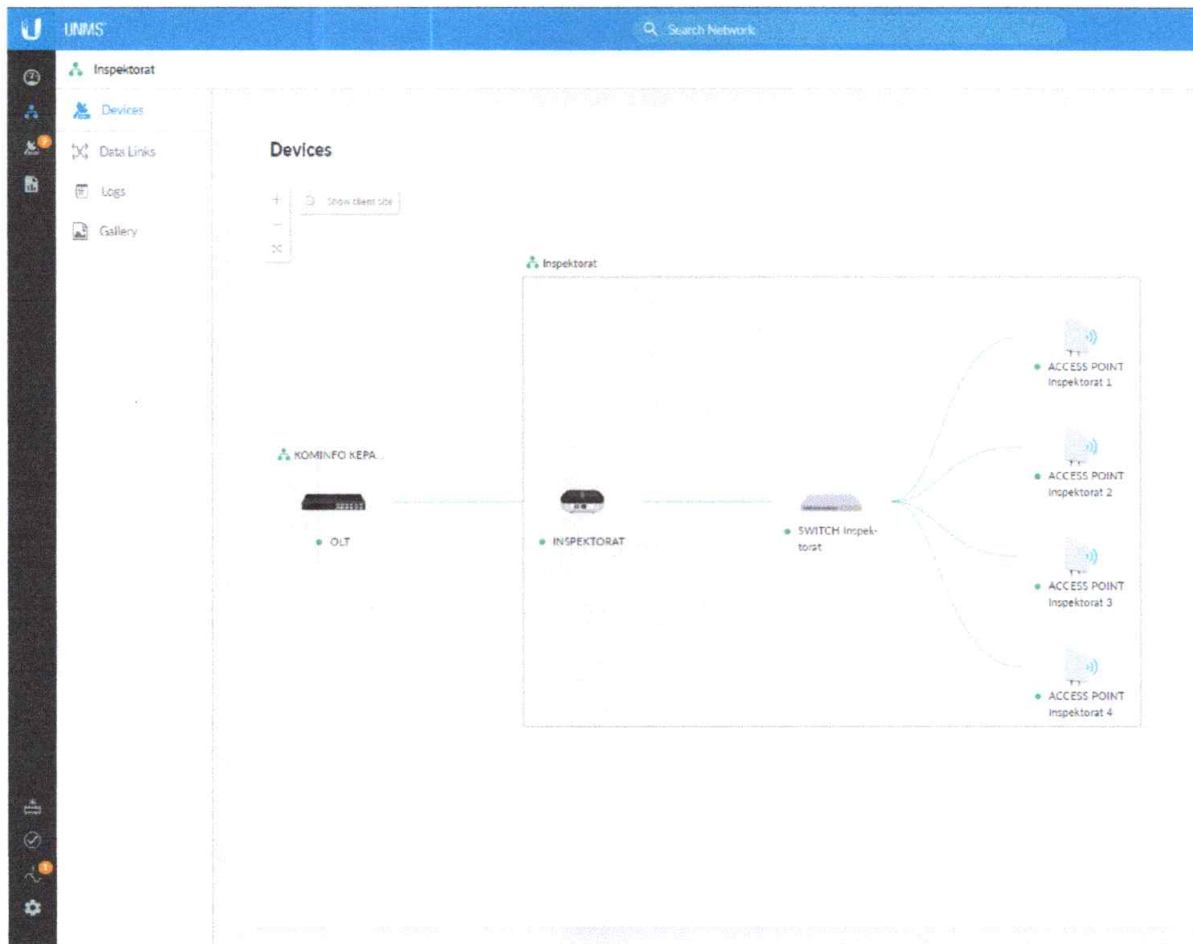
- Topologi Jaringan Dinas Dukcapil



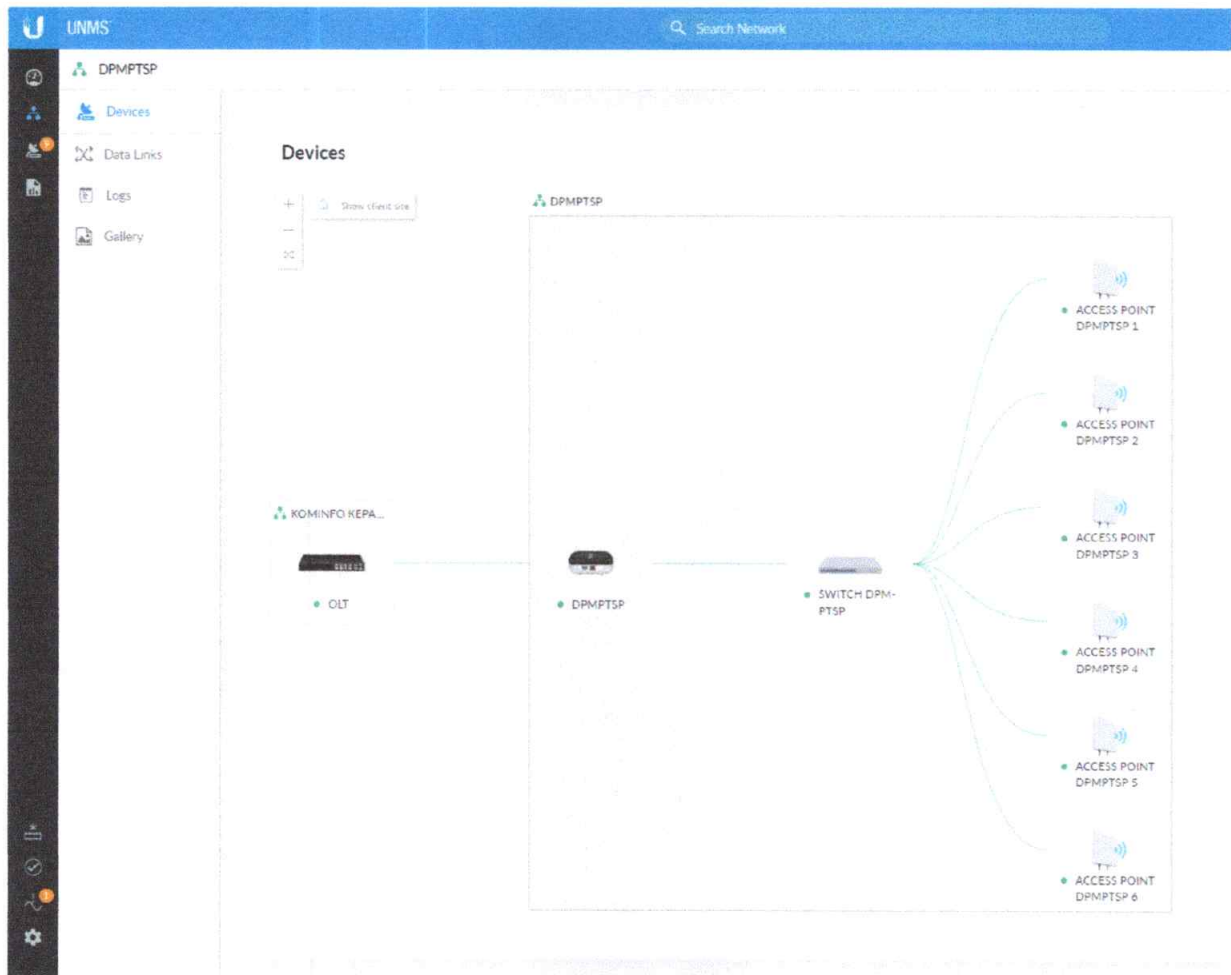
- Topologi Jaringan Dinas KB



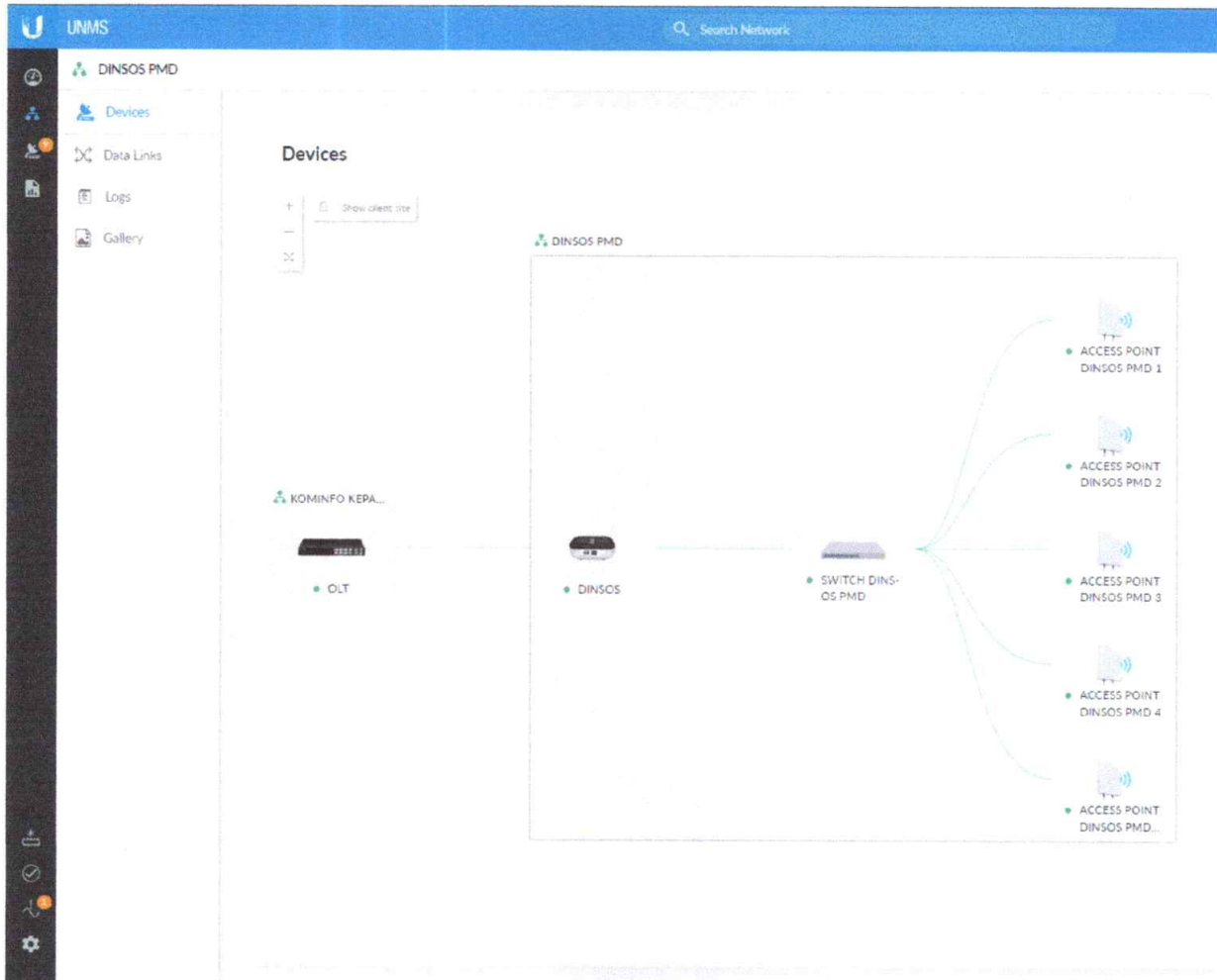
- Topologi Jaringan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang



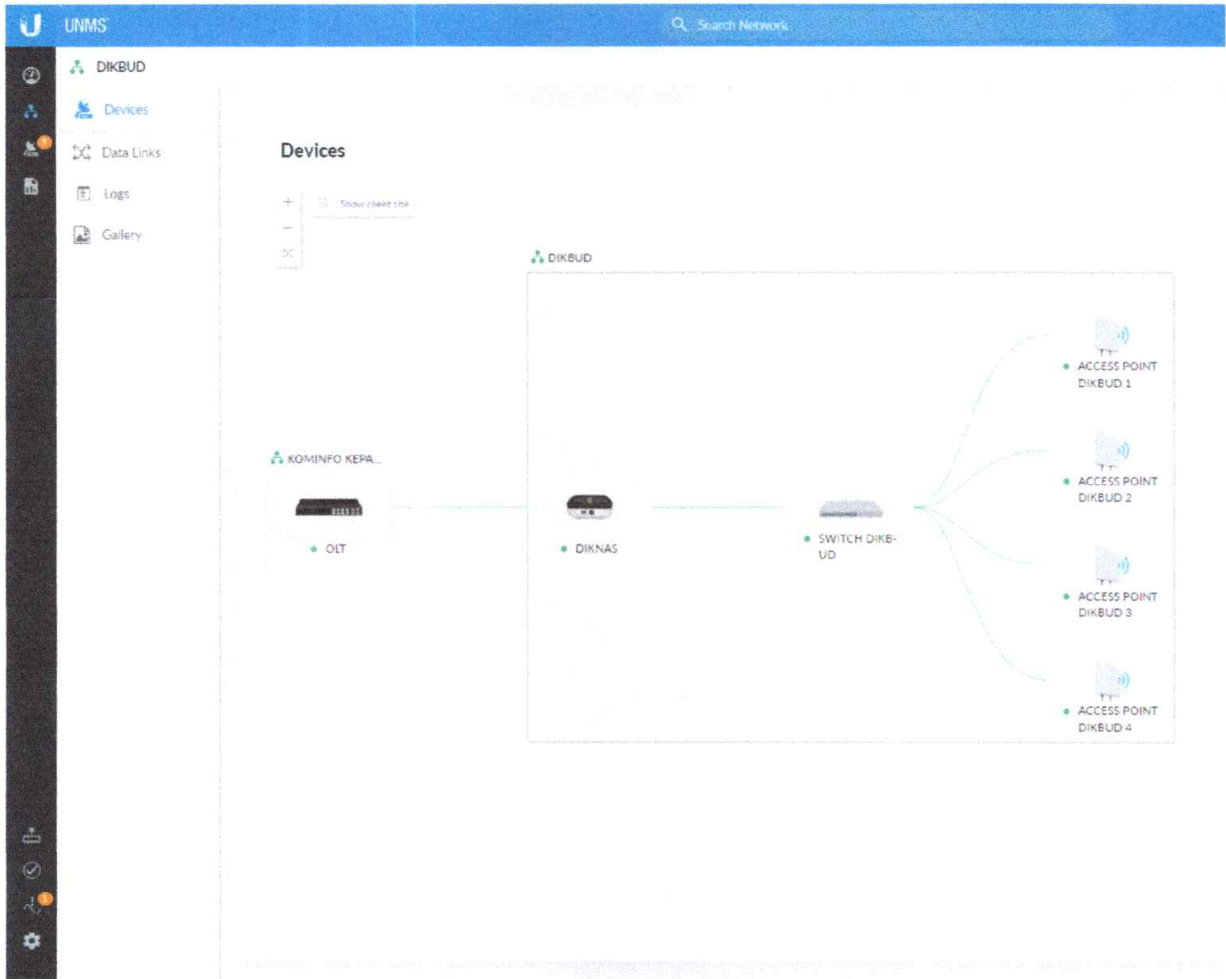
- Topologi Jaringan DPMPTSP



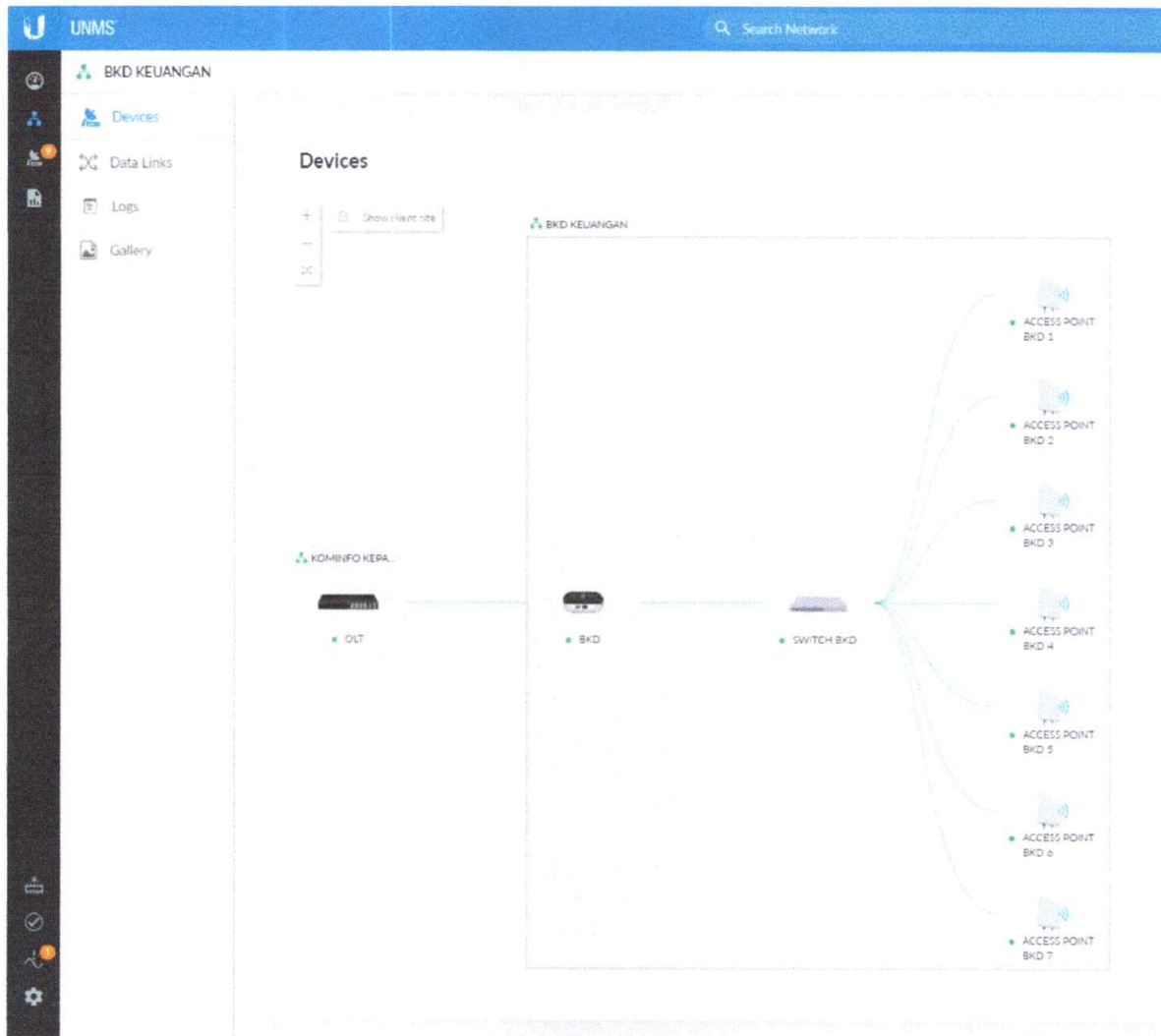
- Topologi Jaringan Dinsos PMD



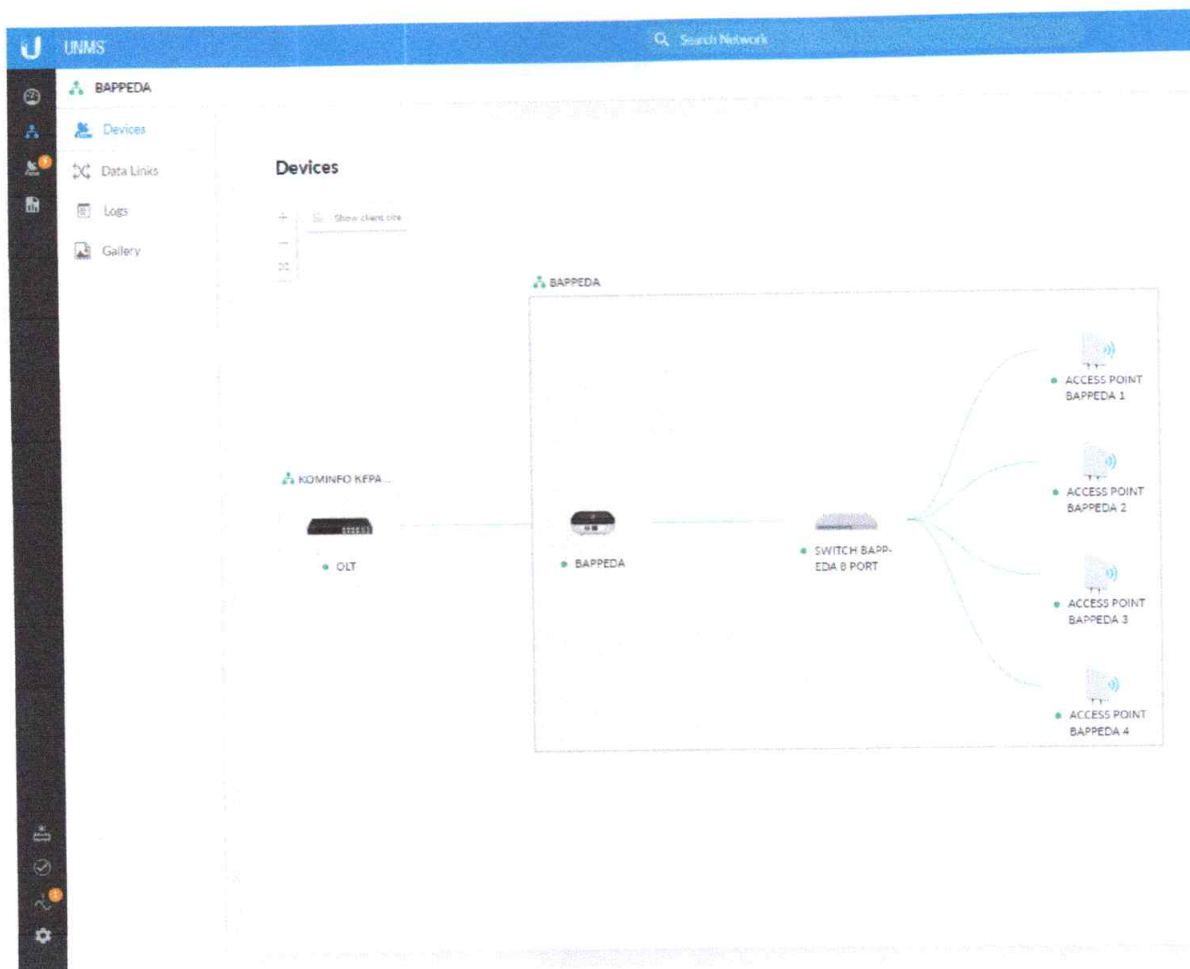
- Topologi Jaringan Dinas DIKBUD



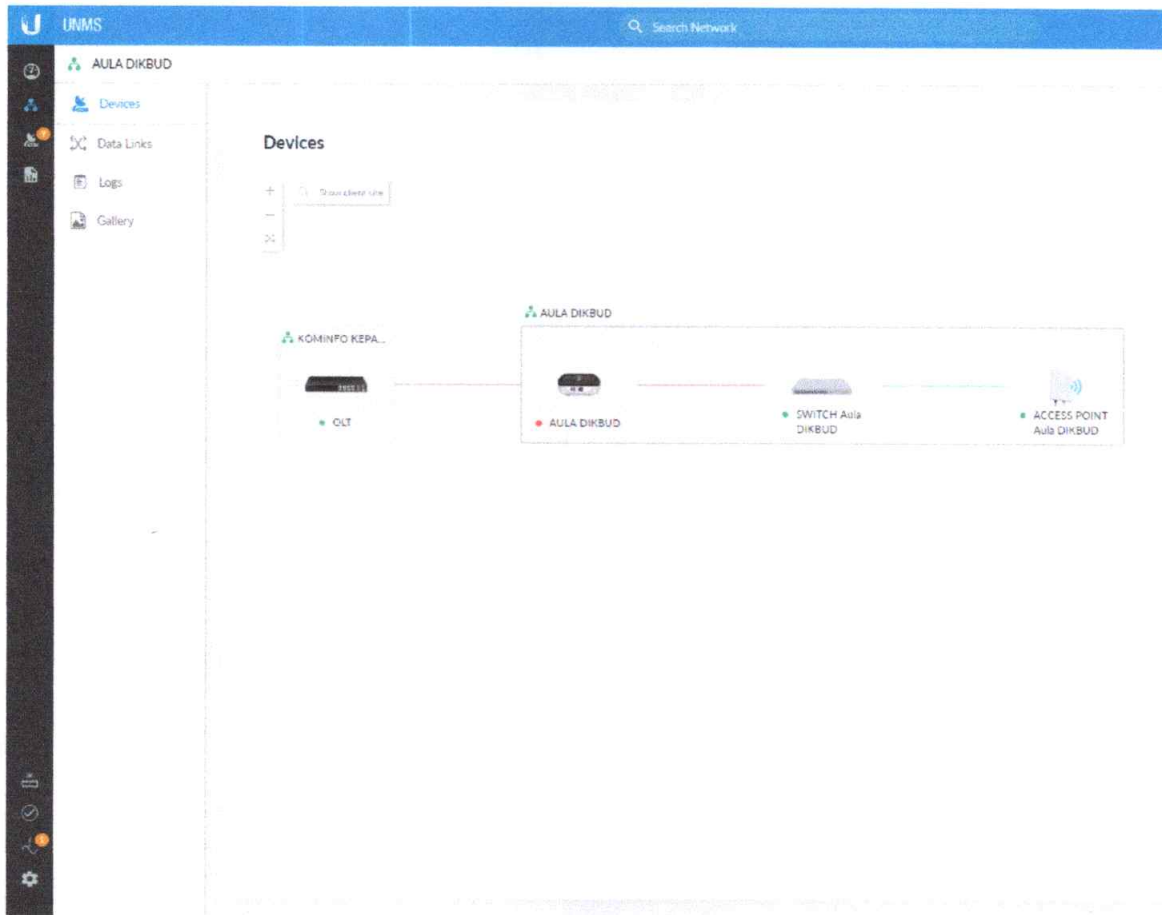
- Topologi Jaringan Badan Keuangan Daerah



- Topologi Jaringan BAPPEDA



- Topologi Jaringan AULA DIKBUD





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. KEPAHANG

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021



Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,

Rini Widyantini
Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

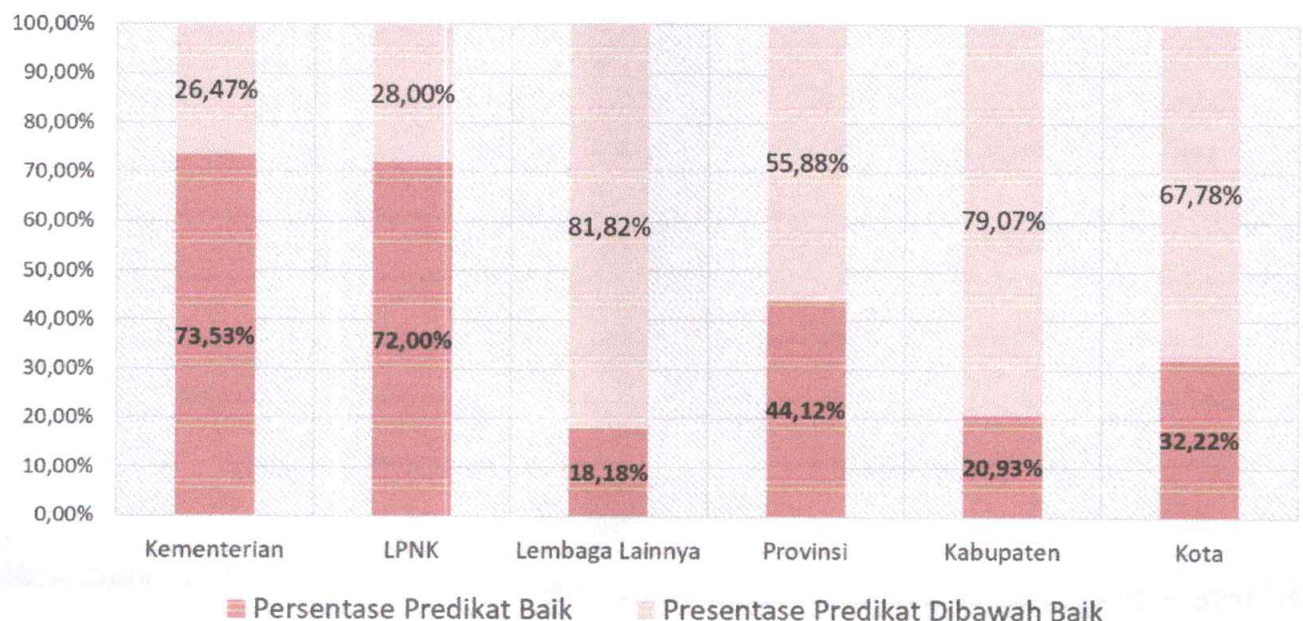
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	1,94
	Domain Kebijakan SPBE	2,60
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,60
	Domain Tata Kelola SPBE	1,20
	Perencanaan Strategis SPBE	1,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50
	Penyelenggara SPBE	1,00
	Domain Manajemen SPBE	1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	2,51
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,40
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara umum, Kabupaten Kepahiang belum memiliki peraturan daerah yang secara lengkap mengatur seluruh aspek SPBE. Namun, Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2021 sudah mencakup sebagian besar kebijakan SPBE.

- **Kekuatan**
Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2021 sudah mencakup berbagai macam peraturan dasar untuk melaksanakan SPBE
- **Kelemahan**
Peraturan turunan yang mengatur detail teknis dari Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2021 terlihat belum disusun secara komprehensif. Saat proses interviu terlihat bahwa implementasi aturan tersebut masih baru akan dimulai

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek perencanaan aspek strategis SPBE di kabupaten kepahiang belum terpenuhi.

- **Kekuatan**
Tidak ada kekuatan yang terlihat dari aspek perencanaan
- **Kelemahan**
Bukti yang disampaikan sangat minim sehingga tidak dapat memberikan gambaran utuh tentang proses perencanaan strategis SPBE di kabupaten kepahiang

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

secara keseluruhan, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupateng Kepahiyang masih belum terpenuhi. Dokumen berupa layanan hosting dan topologi jaringan mengkonfirmasi bahwa kabupaten

kepahiang belum memiliki pengembangan teknologi informasi dan komunikasi selain dari penyediaan hosting server dan layanan jaringan

- Kekuatan
Tidak ada kekuatan yang terlihat karena data dukung yang diberikan hanya penyediaan hosting server
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak dapat menunjukkan bukti lain selain hosting dan layanan jaringan

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada aspek penyelenggara SPBE belum dapat dipenuhi oleh pemerintah kabupaten kepahiang

- Kekuatan
Tim penyelenggara sudah tersedia dasar hukumnya
- Kelemahan
Pelaksanaan kerja dan kegiatan dari penyelenggara SPBE belum dilakukan secara optimal dan terjadwal secara periodik monevnya.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada aspek manajemen SPBE di Kabupaten Kepahiang belum dipenuhi.

- Kekuatan
Tidak ada kekuatan yang terlihat di aspek ini dikarenakan bukti dukung yang sangat minim.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak dapat menunjukkan bukti dukung untuk aspek ini baik saat penilaian dokumen, interviu maupun pada saat melakukan perbaikan setelah interviu.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan aspek Audit TIK di Kabupaten Kepahiang belum dipenuhi

- Kekuatan
Tidak ada kekuatan yang terlihat dari bukti dukung yang diberikan
- Kelemahan
Tidak ada bukti dukung tentang proses audit yang dilakukan oleh Kabupaten Kepahiang

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan aspek Layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten kepahiang belum dapat dipenuhi secara sempurna. Aplikasi yang digunakan adalah SIPD, SIMDA, LPSE, e-sakip,

- Kekuatan
Kabupaten kepahiang sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan SIPD dan SIMDA secara rutin . Bagian pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan LPSE. Hal ini telah dibuktikan melalui bukti dukung pemanfaatan aplikasi tersebut oleh pemerintah daerah dan demo pada saat penilaian wawancara.
- Kelemahan
Penggunaan SRIKANDI sebagai layanan kearsipan masih pada tahap awal. Bagian kepegawaian dan layanan kinerja pegawai serta layanan pengawasan internal pemerintah belum menyertakan bukti dukung.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pada aspek layanan publik berbasis elektronik, kabupaten Kepahiang belum menerapkan secara sempurna. Pemenuhan aspek ini belum maksimal. Kabupaten Kepahiang sudah menggunakan e-lapor, data dari BPS, JDIH, OSS

- Kekuatan
Layanan SIMRS yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Kepahiang dapat menjadi pengalaman yang dapat ditularkan ke dinas lain untuk segera menerapkan layanan publik berbasis elektronik
- Kelemahan
Tidak ada dokumen pendukung tambahan yang diunggah oleh Kabupaten Kepahiang setelah proses reviu sehingga tidak ada tindak lanjut yang dapat dilakukan.

Rekomendasi

Secara prinsip dengan adanya kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kabupaten Kepahiang. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Kepahiang sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Kepahiang adalah aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, dan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya kebijakan tata kelola melalui peraturan bupati yang sudah mencakup berbagai macam peraturan dasar untuk melaksanakan SPBE. Peraturan tersebut sudah mengatur Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan sistem penghubung, manajerial keamanan informasi sampai dengan kebijakan mengamankan sumber daya manusia kabupaten kepahiang untuk dapat berkoordinasi secara internal dan eksternal melalui tim koordinasi SPBE Instansi. Keunggulan ini juga tercermin dari penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan public berbasis elektronik dimana Kabupaten Kepahiang sudah dapat menggunakan aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan aktivitas di daerah. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SBPE di internal Kabupaten Kepahiang menjadi cukup efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun kinerja.

Namun disisi lain, Kabupaten Kepahiang masih terdapat beberapa kelemahan khususnya pada aspek perencanaan strategis, aspek TIK, aspek penyelenggaraan SPBE, aspek penerapan manajemen dan aspek audit TIK. Stakeholder terkait perlu melakukan diskusi bersama untuk menerjemahkan peraturan gubernur menjadi peraturan teknis yang lebih bisa diimplementasikan di lapangan. Kabupaten Kepahiang juga perlu memikirkan lebih serius tentang aspek perencanaan SPBE. Perencanaan SPBE perlu segera didiskusikan di level pimpinan bersama dengan Bappeda.. Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, Kabupaten Kepahiang perlu memulai pengembangan selain dari aspek hosting dan penyediaan jaringan saja. Pada aspek penyelenggara SPBE, pemerintah kabupaten Kepahiang perlu melakukan evaluasi terhadap personil yang diangkat dan segera merencanakan kegiatan pendukung pelaksanaan SPBE. Pada aspek berikutnya, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE, Kabupaten Kepahiang perlu segera memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan manajemen SPBE mulai dari manajemen risiko sampai dengan manajemen layanan. Kabupaten Kepahiang juga direkomendasikan untuk melakukan berbagai pembelajaran tentang audit TIK. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, Kabupaten Kepahiang perlu segera menerapkan layanan manajemen kinerja, pengawasan internal, kearsipan dan aplikasi umum lainnya yang sudah dimiliki oleh pemerintah pusat. Kabupaten Kepahiang perlu melakukan training secara berkala saat penerapan aplikasi-aplikasi tersebut di OPD terkait. Pada aspek layanan publik berbasis elektronik, best practices implementasi SIMRS dapat dijadikan acuan untuk membuat layanan publik berbasis elektronik lainnya.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2



**PEMERINTAH KEPAHIANG
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)**

A. TANAH

JN : 2021
 E LOKASI : 06.09.21.02.0101
 /NSI : BENGKULU
 JPATEN / KOTA : KEPAHIANG
 NG : BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
) : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
 UNIT : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		TAHUN PENGADAAN	LUAS (M2)	LETAK / ALAMAT	STATUS TANAH			PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	KODE BARANG	REG				HAK	TANGGAL	SERTIFIKAT NOMOR				
2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
01.01 TANAH												
Tanah Untuk Bangunan Tempat Penjaja/Jasa / Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	00001	2018	2.043,00	Desa Pelangian (Dinas Komunikasi Informatika Persandian & Statistik)	Tanah Milik Penda	07/11/2018	07.07.01.14.4.00 046	Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian & Statistik	HIBAH	1.323.060.963,28	Dinas Komunikasi Informatika Persandian & Statistik Kabupaten Kepahiang
TOTAL TANAH											1.323.060.963,28	

**MENGETAHUI,
PENGUNA BARANG**



NURIMANI, SE
NIP. 19690128 199801 2 003

Kepahiang, 19 Januari 2022
PENGURUS BARANG



EKO SETIAWAN, A.Md
NIP. 19780113 200904 1 001



**PEMERINTAH KEPAHIANG
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
C. GEDUNG DAN BANGUNAN**

Tahun : 2021
Lokasi : 06.09.21.02.0101
Instansi : BENGKULU
Kabupaten / Kota : KEPAHIANG
Unit : BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Instansi : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Unit : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		KONDISI	KONSTRUKSI BANGUNAN		LUAS LANTAI (M ²)	TAHUN	LETAK / ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		LUAS (M ²)	STATUS TANAH	KODE TANAH	ASAL USUL	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	KODE BARANG	REG		BERTINGKAT	BETON				TANGGAL	NOMOR						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.11 BANGUNAN GEDUNG																
Bangunan Gedung Kantor / Bangunan Gedung Kantor permanen	03.11.01.01.01	00007	B	YA	YA	340	2013	Jl. Alpda Muan Komplek Perkantoran Kepahiang			340	Tanah Milik Penda	01.01.11.04.01	APBD	381,922,585.60	Gedung Dina Komunikasi Informatika Persandian D Statistik Kabupaten Kepahiang
TOTAL BANGUNAN GEDUNG															381,922,585.60	
TOTAL Gedung dan Bangunan															381,922,585.60	

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		KONDISI	KONSTRUKSI	PANJANG (M2)	LEBAR (M2)	LUAS (M2)	TAHUN	LETAK / ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		STATUS TANAH	KODE TANAH	ASAL USUL	HAJ (R)
		KODE BARANG	REG								TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

MENGETAHUI,

PENGGUNA BARANG



NURIMANI, SE

NIP. 19690128 199801 2 003

Kepahiang, 19 Januari 2022
PENGURUS BARANG

EKO SETIAWAN, A.Md

NIP. 19780113 200904 1 001



**PEMERINTAH KEPAHANG
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
D. JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN**

IN : 2021
 LOKASI : 06.09.21.02.0101
 /INSI : BENGKULU
 IPATEN / KOTA : KEPAHANG
 NG : BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
) : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
 UNIT : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		KONDISI	KONSTRUKSI	PANJANG (M2)	LEBAR (M2)	LUAS (M2)	TAHUN	LETAK / ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		STATUS TANAH	KODE TANAH	ASAL USUL	HARGA (Rp)	KETERAN
	KODE BARANG	REG								TANGGAL	NOMOR					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.15 INSTALASI																
Instalasi Air Bersih/Air Baku lainnya / Instalasi Air Bersih lain-lain	04.15.01.05.05	00001	B	PDAM	0	0	0	2012	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kepahiang	23/11/2012	07/SPK/Bag. 5/2012	Tanah Milik Pemda		APBD	17,750,000.00	Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih
TOTAL INSTALASI															17,750,000.00	
TOTAL Jalan, Irigasi dan Jaringan															17,750,000.00	

JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		KONDISI	KONSTRUKSI BANGUNAN		LUAS LANTAI (M ²)	TAHUN	LETAK / ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		LUAS (M ²)	STATUS TANAH	KODE TANAH	ASAL USUL	HARGA (Rp)	KETERAN
	KODE BARANG	REG		BERTINGKAT	BETON				TANGGAL	NOMOR						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**MENGETAHUI,
PENGGUNA BARANG**



**Kepahiang, 19 Januari 2022
PENGGURUS BARANG**

**EKO SETIAWAN, A.Md
NIP. 19780113 200904 1 001**

